

INDOTEXTILES

The Indonesian Textiles, Apparel & Fashion Community Reference



Guncangan Tarif 2025: Mimpi Buruk Warga Amerika

Ancaman kenaikan biaya hidup di Amerika Serikat kini tidak lagi hanya menghantui sektor bahan bakar atau bahan pangan di kasir supermarket, melainkan telah merambah ke dalam lemari pakaian warga. Sebuah laporan terbaru dari Gold Institute for International Strategy memperingatkan adanya "panik harga" pada sektor pakaian menyusul pemberlakuan arsitektur tarif baru yang mulai berlaku sejak April 2025. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai guncangan struktural terbesar bagi industri tekstil dalam satu abad terakhir.

Laporan bertajuk "Turning Tariffs into Opportunity" tersebut menyoroti bahwa tarif dasar sebesar 10 persen pada hampir semua impor, ditambah dengan tindakan timbal balik (reciprocal measures) yang melonjak hingga di atas 50 persen pada kategori tertentu, telah mengubah total peta ekonomi pengadaan pakaian. Data dari Yale Budget Lab memperkirakan tarif efektif rata-rata AS saat ini mencapai kisaran 18,6 hingga 22,5

persen—level tertinggi yang belum pernah terlihat lagi sejak tahun 1909 atau era Depresi Besar 1930-an.

Dampaknya terhadap konsumen sangat nyata. Gold Institute memproyeksikan bahwa paket tarif 2025 ini dapat mendongkrak harga pakaian sebesar 38 persen dalam jangka pendek. Bahkan dalam jangka panjang, harga diperkirakan akan tetap 17 persen lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya jika rantai pasok tidak segera melakukan penyesuaian drastis. Kondisi ini dipicu oleh ketergantungan industri pakaian yang sangat tinggi terhadap input lintas batas dan margin keuntungan yang sangat tipis.

Namun, di balik tekanan harga tersebut, Gold Institute melihat adanya peluang untuk merombak globalisasi. Alih-alih bergantung pada satu pusat otoriter seperti Tiongkok, laporan ini mengusulkan model pengadaan "banyak simpul, satu standar" yang tersebar di negara-negara demokratis. Koridor strategis yang diusulkan meliputi Bangladesh, Kenya, dan Peru. Bangladesh diposisikan sebagai jangkar produksi skala besar, Peru sebagai opsi nearshoring dengan akses bebas bea cukai, sementara Kenya bergantung pada perpanjangan Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA).

"Doktrin America First pada akhirnya berupaya membentuk kembali globalisasi agar rantai nilai kritis memperkuat keamanan Amerika dan kemakmuran kelas menengah," tulis laporan tersebut. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada negara pesaing dengan menyebarkan produksi ke jaringan mitra yang berorientasi pada reformasi.

Untuk meredam gejolak harga, lembaga tersebut merekomendasikan sistem akreditasi "Trusted Textiles" yang

memberikan jalur hijau pabean bagi pabrik-pabrik yang patuh pada standar lingkungan dan tenaga kerja. Dengan mengalihkan produksi ke koridor Global South yang terkoordinasi, AS diharapkan dapat membangun jaringan pasokan yang lebih tangguh dan selaras dengan nilai-nilai keamanan nasional, sekaligus mencoba menjinakkan inflasi yang kini mulai menggerogoti kantong para pembeli di toko-toko ritel seluruh negeri.

Salam,
Tim Redaksi

ISI EDISI ke-96 Berita Utama

- Airlangga Tegaskan Tekstil Bukan Industri Senja: Kebutuhan Baju dan Sepatu Tak Pernah Hilang

Berita Terbaru

- DPR Ingatkan Risiko Investasi Jumbo BUMN Tekstil di Tengah Banjir Impor
- Kesepakatan Dagang AS–Bangladesh Beri Nafas Baru Industri Garmen
- Tenun Sidan Kapuas Hulu Harumkan Indonesia di INACRAFT Awards 2026
- Pameran Internasional Techtextil dan Texprocess 2026 Membuka Ruang bagi Inovasi
- Tekstil Nasional Desak Pembentukan Pengawasan Impor Demi Pulihkan Serapan Tenaga Kerja
- Aset Sitaan Sritex Berpotensi Dimanfaatkan untuk BUMN Tekstil Baru
- Optimisme Pemerintah: Ekspor Tekstil Diproyeksi Melonjak 10 Kali Lipat dalam Satu Dekade
- Menjahit Ulang Daya Saing: Jalan Panjang Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia
- Kolaborasi Strategis RI–AS Bernilai Rp 600 Triliunan, 11 MoU Diteken di Forum Bisnis Washington
- Utilisasi Tertekan, Impor Kapas dari AS Kian Sulit Terdongkrak
- BELL dan ZATA Cetak Rekor Tertinggi Setahun, Euforia Saham Tekstil Menguat

- Kuota Ekspor 0% ke AS Dinilai Berat, Industri Tekstil Terkendala Utilisasi dan Syarat Impor Kapas
- Akses Nol Tarif ke AS Dibuka, Industri Tekstil RI Siap Bangkit
- KAHMI Tekstil Tuntut Transparansi MOU Worn Clothing Dalam ART Dengan AS

BERITA UTAMA

Airlangga Tegaskan Tekstil Bukan Industri Senja: Kebutuhan Baju dan Sepatu Tak Pernah Hilang



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) bukanlah industri sunset atau sektor yang mengalami penurunan permanen. Ia menilai anggapan tersebut keliru karena kebutuhan dasar manusia terhadap pakaian dan alas kaki tidak akan pernah hilang.

Menurut Airlangga, tidak ada satu pun sektor industri di Indonesia yang benar-benar mengalami sunset, termasuk industri tekstil. Selama manusia masih membutuhkan baju dan sepatu, pasar industri TPT akan selalu tersedia. Karena itu, ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi XI DPR RI untuk memastikan sektor ini tetap mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

Airlangga menyoroti adanya penilaian dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

yang mengkategorikan industri tekstil sebagai sektor sunset, sehingga menyulitkan pelaku usaha memperoleh kredit. Padahal, secara global, potensi pasar tekstil masih sangat besar. Dengan jumlah penduduk dunia mencapai sekitar 8 miliar jiwa, hampir tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pakaian dan sepatu.

Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menjalin berbagai kerja sama perdagangan dengan negara-negara di Asia dan Eropa, serta tengah mengupayakan perluasan kerja sama dengan Amerika Serikat. Dengan jaringan perdagangan tersebut, produk TPT Indonesia berpeluang menjangkau pasar global yang luas.

Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjadi salah satu pemain besar industri tekstil dunia. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah investasi ulang dan peremajaan teknologi agar industri nasional mampu kembali bersaing. Ia menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, mulai dari biaya energi, upah tenaga kerja, hingga tarif listrik dan air yang relatif lebih kompetitif dibandingkan Vietnam maupun China.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mengembalikan kekuatan industri padat karya, termasuk tekstil. Presiden Prabowo Subianto, kata Airlangga, telah menyetujui penyiapan dana sebesar US\$6 miliar sebagai bagian dari strategi penguatan sektor tersebut, lengkap dengan peta jalan pengembangannya.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak investor asing dengan merek tekstil ternama yang bertahan dan bahkan terus mengembangkan usahanya di Indonesia. Pemerintah berencana menyiapkan dana US\$6 miliar tersebut untuk skema co-investment atau co-financing guna

mendorong modernisasi industri dan meningkatkan daya saing.

Airlangga menambahkan, Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu dari lima negara di dunia yang mampu tampil sebagai pemain besar industri tekstil global. Optimisme ini didorong oleh basis industri yang sudah ada, ketersediaan tenaga kerja, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah juga menegaskan komitmennya menyiapkan dana sekitar US\$6 miliar untuk peremajaan teknologi industri tekstil nasional. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlangsungan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja, sekaligus memastikan investasi di sektor tekstil tetap berjalan di tengah ketatnya persaingan global.

Airlangga menyebut industri tekstil saat ini menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja dan masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan adaptasi teknologi yang tepat dan iklim investasi yang kondusif, sektor ini diyakini mampu kembali menjadi tulang punggung industri manufaktur nasional.



BERITA TERBARU

DPR Ingatkan Risiko Investasi Jumbo BUMN Tekstil di Tengah Banjir Impor



Rencana pemerintah membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil dengan nilai investasi hampir Rp100 triliun menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sejumlah anggota Komisi VI DPR mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah menggelontorkan dana besar tanpa pembenahan mendasar, khususnya di sisi regulasi dan perlindungan industri tekstil dalam negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menyoroti derasnya arus masuk produk tekstil impor asal China yang dinilai telah menekan industri nasional. Ia menyebut hampir seluruh produk pakaian di pasar domestik saat ini dikuasai barang impor, dengan porsi produk China mencapai sekitar 90 persen. Menurutnya, harga yang sangat murah dengan kualitas yang dinilai memadai membuat produk lokal semakin sulit bersaing.

Senantara menilai banjir impor tersebut menjadi salah satu faktor utama runtuhnya industri tekstil nasional yang berdampak pada maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menekankan persoalan utama terletak pada regulasi yang tidak sinkron antar kementerian. Di satu sisi, pemerintah mendorong penguatan produksi dalam

negeri, namun di sisi lain kebijakan impor justru dibuka lebar.

Ia juga mengingatkan bahwa rencana investasi jumbo di sektor tekstil merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara serius. Tanpa perlindungan regulasi yang kuat, industri tekstil baru dinilai sulit bersaing, terutama dari sisi harga. Senantara mencontohkan produk kaos impor asal China yang dijual sangat murah, bahkan sekitar Rp50.000 untuk enam potong pakaian.

Pandangan senada disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel. Ia mengkritisi rencana pendirian pabrik tekstil baru dan menyinggung pengalaman BUMN baja PT Krakatau Steel Tbk sebagai pembelajaran. Menurut Gobel, mendirikan pabrik relatif mudah, namun menjalankan dan menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan pasar bebas jauh lebih sulit dan berisiko menimbulkan kerugian negara.

Gobel menilai, tanpa visi dan strategi yang jelas, pembangunan BUMN tekstil justru berpotensi bernasib sama atau bahkan lebih buruk. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus mendukung industri tekstil nasional yang sudah ada, terutama pelaku usaha menengah di daerah seperti Pekalongan dan sentra tekstil lainnya. Dukungan tersebut dapat berupa kredit berbunga rendah atau kebijakan lain yang langsung menyentuh kebutuhan pelaku usaha yang telah terbukti mampu menembus pasar ekspor.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memang tengah merencanakan pembangunan pabrik tekstil untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah melakukan studi awal, dengan rencana pendanaan

sebesar US\$6 miliar atau setara Rp100,5 triliun yang bersumber dari Danantara. Proyek ini ditargetkan mampu meningkatkan nilai ekspor tekstil Indonesia hingga US\$40 miliar dari posisi saat ini yang masih berkisar US\$4 miliar.

Di sisi lain, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan besarnya pasar sandang nasional harus dijaga agar tidak dikuasai produk impor ilegal. Dengan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta jiwa, belanja masyarakat untuk sandang diperkirakan mencapai Rp119,8 triliun per tahun. Namun, meski impor pakaian bekas telah dilarang melalui sejumlah peraturan menteri perdagangan, realisasinya justru menunjukkan lonjakan pada 2024 dengan volume sekitar 3.865 ton.

Faisol menilai impor pakaian bekas sangat merugikan negara dan industri dalam negeri karena harganya yang jauh lebih murah memukul produk lokal. Hal tersebut juga berdampak langsung pada keberlangsungan UMKM di sektor pakaian jadi.

Sejalan dengan itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam Permendag Nomor 47 Tahun 2025. Pemerintah, kata dia, secara rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal sejak 2022. Total nilai pakaian bekas impor ilegal yang berhasil disita mencapai sekitar Rp248,11 miliar.

Menurut Budi, larangan impor pakaian bekas diberlakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga keberlangsungan industri pakaian jadi dalam negeri—khususnya UMKM—serta mencegah Indonesia menjadi tujuan pembuangan limbah tekstil global.

Kesepakatan Dagang AS–Bangladesh Beri Nafas Baru Industri Garmen



Bangladesh memperoleh pemangkasan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19 persen melalui perjanjian perdagangan bilateral yang ditandatangani pada Senin (9/2/2026). Kesepakatan ini memberikan perlakuan khusus bagi industri tekstil dan pakaian jadi Bangladesh, terutama untuk produk yang menggunakan kapas dan serat buatan asal Amerika Serikat, yang akan menikmati tarif timbal balik nol saat memasuki pasar AS.

Kepala penasihat pemerintahan sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyatakan bahwa Washington memberikan komitmen khusus dalam perjanjian tersebut. Amerika Serikat sepakat membangun mekanisme agar produk tekstil dan garmen tertentu dari Bangladesh dapat masuk ke pasar AS tanpa bea masuk, selama memenuhi ketentuan bahan baku yang disepakati.

Sebagai imbal balik, Bangladesh berkomitmen membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk industri dan pertanian Amerika Serikat. Produk yang akan memperoleh kemudahan akses mencakup bahan kimia, alat kesehatan, mesin, kendaraan bermotor dan suku cadangnya, serta berbagai komoditas pertanian seperti kedelai, susu, daging sapi, unggas, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Pemerintah Bangladesh juga sepakat mengurangi

hambatan non-tarif, termasuk dengan mengakui standar keselamatan dan emisi kendaraan AS serta sertifikasi Food and Drug Administration, serta menghapus pembatasan impor barang hasil daur ulang.

Perjanjian tersebut turut memuat rencana peningkatan pembelian produk asal Amerika Serikat. Kedua negara mencatat sejumlah kesepakatan komersial yang telah berjalan dan direncanakan, di antaranya pembelian produk pertanian AS senilai sekitar 3,5 miliar dollar AS dan produk energi senilai sekitar 15 miliar dollar AS untuk jangka waktu 15 tahun. Selain itu, dokumen perjanjian setebal 32 halaman yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat menyebut Biman Bangladesh Airlines berencana membeli 14 pesawat Boeing dengan opsi tambahan, yang pertama kali diumumkan pada Juli tahun lalu saat negosiasi masih berlangsung.

Kesepakatan juga mencakup rencana pembelian peralatan militer Amerika Serikat, meski jumlah dan jenisnya tidak dirinci. Bangladesh menyatakan akan membatasi pembelian alat pertahanan dari negara tertentu sebagai bagian dari komitmen kerja sama strategis dengan Washington.

Selain aspek ekonomi, perjanjian ini turut memuat komitmen non-ekonomi. Bangladesh berjanji menjunjung hak-hak buruh yang diakui secara internasional serta memperkuat perlindungan lingkungan. Yunus menyebut kesepakatan tersebut sebagai hasil perundingan intensif selama sembilan bulan sejak April tahun lalu. Sebelumnya, pada Agustus, Bangladesh telah lebih dulu memperoleh penurunan tarif ekspor ke AS menjadi 20 persen dari rencana awal 37 persen, yang memberi ruang bernapas bagi industri garmen nasional yang sangat bergantung pada pasar ekspor.

Secara regional, tarif impor Bangladesh masih sedikit lebih tinggi dibanding tarif 18

persen yang disepakati Amerika Serikat dengan India pekan lalu. Namun, kesepakatan dengan India masih memerlukan perundingan lanjutan. Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, menyebut Bangladesh sebagai negara pertama di Asia Selatan yang berhasil menuntaskan kesepakatan perdagangan timbal balik dengan AS.

Industri garmen siap pakai merupakan tulang punggung perekonomian Bangladesh. Sektor ini menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan ekspor nasional, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, dan berkontribusi sekitar 10 persen terhadap produk domestik bruto. Kesepakatan dagang ini dinilai menjadi momentum penting bagi Bangladesh di tengah situasi politik domestik, menjelang pemilihan umum yang akan digelar Kamis, setelah negara tersebut dipimpin pemerintahan sementara sejak Agustus 2024.



Tenun Sidan Kapuas Hulu Harumkan Indonesia di INACRAFT Awards 2026

Kabupaten Kapuas Hulu kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang internasional. Kerajinan tradisional Tenun Sidan khas Kapuas Hulu berhasil meraih Juara III kategori tekstil pada ajang INACRAFT Awards 2026 tingkat Asia Tenggara yang digelar di Jakarta.

Penghargaan tersebut diraih melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)

Kabupaten Kapuas Hulu dan diserahkan dalam acara yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (6/2/2026). Ketua Dekranasda Kabupaten Kapuas Hulu, Angeline Fremalco Fransiskus Diaan, menerima langsung penghargaan dari Chairman of Exporters and Producers of Indonesian Handicraft, Muchsin Ridjan.



Angeline menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Tenun Sidan kembali meraih penghargaan menjadi bukti bahwa kerajinan lokal Kapuas Hulu memiliki kualitas tinggi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Tenun Sidan yang meraih penghargaan tersebut merupakan karya Susiana Tau, pengrajin lokal binaan Dekranasda Kabupaten Kapuas Hulu. Selama ini, Susiana Tau dikenal konsisten mengembangkan tenun tradisional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Berdasarkan penilaian dewan juri INACRAFT Awards 2026, Tenun Sidan dinilai memiliki keunikan motif yang kuat. Motif-motifnya terinspirasi dari alam, kepercayaan, serta nilai-nilai spiritual masyarakat Kapuas Hulu, yang kemudian diwujudkan dalam karya tekstil bernilai seni tinggi.

Selain keindahan visual, Tenun Sidan juga mengandung makna filosofis yang mendalam. Kain ini merepresentasikan keseimbangan dan keselarasan, sekaligus menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Salah satu motif yang mendapat perhatian khusus juri adalah motif bunga kopi, yang menjadi simbol khas kehidupan masyarakat Kapuas Hulu.

Motif bunga kopi tersebut dimaknai sebagai lambang kerja keras, ketekunan, serta rezeki yang berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut dinilai berhasil diterjemahkan secara kuat dalam desain tenun yang autentik dan berkarakter.

Angeline menegaskan, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Dekranasda Kapuas Hulu dalam membina dan mendampingi para pengrajin lokal, khususnya perempuan. Ajang INACRAFT 2026 dinilai menjadi ruang strategis untuk menampilkan karya-karya pengrajin daerah sekaligus memperluas akses pasar.

Ke depan, Dekranasda Kapuas Hulu berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas produksi, promosi, serta daya saing kerajinan lokal. Dukungan berkelanjutan diharapkan mampu mendorong produk kerajinan Kapuas Hulu semakin dikenal dan diterima di pasar nasional maupun global.

“Kami akan terus mendukung dan mempromosikan kerajinan tangan Kapuas Hulu agar mampu bersaing di pasar global,” tutup Angeline.

Pameran Internasional Techtexsil dan Texprocess 2026 Membuka Ruang bagi Inovasi

Techtextil dan Texprocess 2026 akan kembali digelar pada tanggal **21 -24 April 2026** di Frankfurt Jerman dengan memberikan terobosan dan ekspansi yang lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya. Pameran kali ini akan menghadirkan tambahan area produk baru, penataan ulang aula pameran akan tampil dengan nuansa yang lebih inovatif, serta item yang dipamerkan pun akan lebih beragam.

Olaf Schmidt, Vice Presiden Tekstil & Teknologi Tekstil di Messe Frankfurt menegaskan bahwa peran Techtexsil dan Texprocess sangat strategis. Menurutnya, inovasi teknologi dan material merupakan kunci untuk menjawab tantangan industri ke depan. Namun, inovasi saja tidak cukup, akses ke pasar internasional dan kemitraan bisnis baru menjadi faktor penentu keberhasilan.

Kondisi industri global saat ini dihadapkan pada perubahan pasar, seperti harga energi yang semakin tinggi dan berkurangnya investasi dikarenakan tidak menentunya kondisi ekonomi. **Techtextil dan Texprocess 2026** akan menghadirkan solusi permasalahan yang terjadi yaitu dengan memberikan gambaran tren teknologi industri terbaru yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Industri tekstil terus berkembang dengan pesat, dan kebutuhan akan inovasi serta teknologi canggih semakin meningkat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan ini, dua pameran internasional, Techtexsil dan Texprocess, hadir sebagai platform bagi para profesional industri tekstil untuk berbagi pengetahuan, membangun jaringan, dan mencari peluang bisnis.

Elgar Straub, Direktur Pelaksana *VDMA Textile Care, Fabrics and Leather*

Technologies, menilai Texprocess sebagai ajang utama bagi perusahaan yang ingin memperkuat posisi mereka di pasar global. Menurutnya, Texprocess membuka ruang bagi pelaku industri untuk melihat langsung arah perkembangan teknologi sekaligus memahami bagaimana industri tekstil akan bergerak di masa depan.



Mengenai Lebih Jauh Apa itu Techtexsil dan Texprocess?

- **Techtexsil** adalah pameran internasional yang fokus pada teknologi tekstil, termasuk bahan, proses, dan aplikasi. Pameran ini menampilkan inovasi terbaru dalam teknologi tekstil, seperti penggunaan *Artificial Intelligence* (AI), digitalisasi, dan otomatisasi. Techtexsil merupakan sarana bagi para peneliti, pengembang, dan produsen tekstil untuk memamerkan hasil karya mereka dan berbagi pengetahuan dengan para profesional industri dari seluruh dunia.
- **Texprocess** adalah pameran internasional yang fokus pada pengolahan tekstil. Pameran ini menampilkan teknologi dan solusi canggih dalam proses jahit, pengemasan, *finishing*, dan pewarnaan. Texprocess menjadi platform bagi para profesional industri tekstil untuk mempelajari tentang tren terbaru dan teknologi inovatif dalam pengolahan tekstil.

Ikuti Perkembangan Inovasi Terbaru Melalui Forum Techtexsil dan Forum Texprocess 2026

Techtextil dan Texprocess 2026 kembali membuka ruang bagi para profesional, peneliti, dan pelaku industri yang ingin ikut berperan dalam membentuk masa depan industri tekstil. Forum ini menjadi panggung penting untuk menampilkan ide baru, inovasi teknologi, dan solusi nyata yang relevan dengan perkembangan industri tekstil global. Tidak hanya sekadar berbagi konsep, forum ini juga mendorong dialog langsung antara dunia penelitian dan industri, sehingga ide-ide yang disampaikan dapat lebih mudah diterapkan di lapangan.

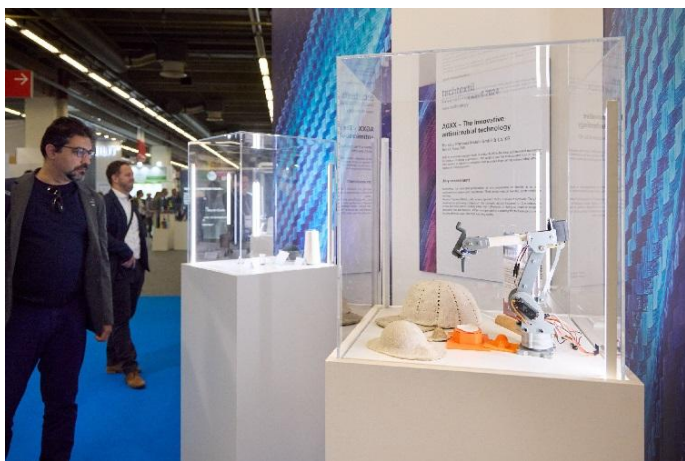
Kedua forum ini akan menjadi bagian dari pameran Techtexsil dan Texprocess 2026 yang berlangsung selama empat hari. Frankfurt kembali menjadi pusat pertemuan bisnis dan diskusi industri tekstil internasional.

Nantinya, forum-forum ini membahas berbagai isu penting, mulai dari pengembangan material, proses produksi, keberlanjutan, hingga digitalisasi. Diskusi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan wawasan baru yang dampaknya tidak berhenti saat pameran berakhir, tetapi berlanjut dalam praktik industri sehari-hari.



Menghargai Inovasi Melalui Techtexsil dan Texprocess Innovation Award 2026

Dalam upaya menghargai inovasi dalam industri tekstil, event ini memberikan penghargaan yaitu **Techtextil dan Texprocess Innovation Award**. Penghargaan ini diberikan bagi para inovator untuk memamerkan solusi positif bagi industri. Adapun kriteria penilaian untuk Techtextil dan Texprocess Innovation Award yaitu tingkat inovasi, keunggulan-keunggulan teknis yang dimiliki, *sustainability* (keberlanjutan), dan apa saja potensi aplikasi yang dihasilkan. Penghargaan ini juga menjadi kesempatan bagi para inovator untuk mendapatkan pengakuan dari industri secara global. Mereka akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan para pemimpin industri dan mendapatkan umpan balik yang berharga untuk meningkatkan solusi mereka. Pemenang Techtextil dan Texprocess Innovation Award juga akan mendapatkan kesempatan untuk memamerkan inovasi mereka di pameran Techtextil dan Texprocess, yang merupakan salah satu pameran tekstil terbesar di dunia. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas mereka di taraf internasional.



Bagaimana Cara Berpartisipasi di Techtextil dan Texprocess 2026?

Jika Anda ingin berpartisipasi dalam acara ini, berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan:

1. Registrasi sebagai Eksibitor

- Jika Anda ingin memamerkan produk atau teknologi Anda, Anda dapat mendaftar sebagai eksibitor.
- Kunjungi situs website resmi [Techtextil dan Texprocess](#) untuk mendapatkan informasi tentang paket pameran dan harga.
- Isi formulir pendaftaran eksibitor dan kirimkan dokumen yang diperlukan.

2. Registrasi sebagai Pengunjung

- Kunjungi situs [Techtextil dan Texprocess](#) untuk mendaftar sebagai pengunjung.
- Isi formulir pendaftaran dengan data yang lengkap dan akurat.
- Setelah pendaftaran, Anda akan menerima konfirmasi dan tiket masuk ke pameran.

3. Mengajukan Proposal Inovasi

- Jika Anda memiliki inovasi terbaru dalam teknologi tekstil, Anda dapat mengajukan proposal inovasi ke [Techtextil dan Texprocess](#).
- Kunjungi situs website [Messe Frankfurt](#) untuk mendapatkan informasi tentang kriteria dan proses pengajuan proposal.
- Kirimkan proposal Anda sebelum batas waktu yang ditentukan.
- Untuk mendapatkan informasi topik penting dan Programme Committee Anda dapat mengaksesnya di halaman [Techtextil Forum](#) dan [Texprocess Forum](#).

4. Berpartisipasi Konferensi dan Seminar

- [Techtextil dan Texprocess](#) akan mengadakan konferensi dan seminar yang membahas topik-topik terkini dalam industri tekstil.
- Kunjungi situs [website Messe Frankfurt](#) untuk mendapatkan informasi tentang jadwal dan topik konferensi.

- Daftarkan diri Anda untuk mengikuti konferensi dan seminar yang menarik bagi Anda.

Pameran internasional Techtexile dan Texprocess 2026 adalah event yang sangat menarik untuk diikuti jika Anda ingin meningkatkan pengetahuan dan jaringan di industri tekstil. Jadi, catat tanggalnya dan berpartisipasi!

Tekstil Nasional Desak Pembenaan Pengawasan Impor Demi Pulihkan Serapan Tenaga Kerja



Industri tekstil nasional kembali menyoroti lemahnya pengawasan impor yang dinilai menjadi penghambat utama pemulihan sektor tersebut. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai pemerintah perlu segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap pengawasan impor guna memberantas praktik ilegal dan perdagangan tidak sehat agar industri tekstil kembali mampu menyerap tenaga kerja pada 2026.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengatakan tekanan terhadap industri tekstil hingga kini masih berasal dari membanjirnya produk impor murah di pasar domestik. Kondisi tersebut diperparah oleh pelemahan ekspor akibat perlambatan ekonomi global, sehingga pelaku usaha dalam negeri terjepit dari dua sisi.

Menurut Redma, keseriusan pemerintah dalam mengendalikan impor menjadi faktor kunci untuk menciptakan persaingan usaha yang adil di pasar domestik. Tanpa pengendalian yang efektif, produk tekstil dalam negeri akan terus kalah bersaing dengan barang impor berharga murah yang masuk secara masif.

APSyFI menilai agenda paling mendesak bagi pemerintahan Presiden Prabowo adalah penegakan hukum terhadap praktik penyelundupan serta optimalisasi instrumen perlindungan perdagangan, seperti kebijakan anti-dumping dan safeguard. Langkah tersebut dinilai krusial untuk melindungi produsen dalam negeri dari praktik perdagangan yang merugikan.

Redma menegaskan, tanpa pengamanan pasar domestik yang kuat, industri tekstil akan sulit memulihkan kapasitas produksi maupun membuka lapangan kerja baru, meskipun investasi baru mulai masuk ke sektor manufaktur. Ia menilai perlindungan pasar harus berjalan seiring dengan masuknya investasi agar dampaknya benar-benar dirasakan industri padat karya.

Terkait pertemuan Presiden Prabowo dengan para konglomerat, APSyFI berharap arus investasi tidak hanya terfokus pada sektor padat modal, tetapi juga menyentuh industri padat karya seperti tekstil. Pasalnya, industri tekstil memiliki rantai produksi panjang dari hulu hingga hilir yang berpotensi menjadi instrumen cepat untuk menekan pengangguran dan kemiskinan.

Namun demikian, Redma mengakui kebijakan pengendalian impor kerap menghadapi hambatan di lapangan. Ia menyinggung masih adanya praktik permainan oleh sejumlah pihak, mulai dari importir hingga oknum birokrasi dan aparat, yang membuat kebijakan sulit diterapkan secara konsisten.

Oleh karena itu, APSyFI menilai diperlukan intervensi langsung dari Presiden agar reformasi pengawasan impor dapat berjalan efektif. Keterlibatan langsung kepala negara dinilai penting untuk memastikan penegakan hukum dan pembenahan sistem pengawasan benar-benar terlaksana dan memberikan perlindungan nyata bagi industri tekstil nasional.

Aset Sitaan Sritex Berpotensi Dimanfaatkan untuk BUMN Tekstil Baru



Kejaksaan Agung merespons rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru di sektor tekstil dengan memanfaatkan aset milik PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang telah disita dalam proses hukum. Korps Adhyaksa diketahui menyita sejumlah aset ekonomi perusahaan tersebut terkait dugaan korupsi penyaluran kredit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Anang Supriatna, menyatakan bahwa pemerintah dimungkinkan memanfaatkan aset berstatus barang sitaan tindak pidana, meski perkara hukum Sritex belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, terdapat mekanisme tertentu agar aset yang telah disita tidak mengalami penyusutan nilai atau kerusakan, selama pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan negara serta menjaga nilai ekonomisnya.

Ia menegaskan, apabila aset dibiarkan tanpa pengelolaan, potensi kerugian negara bisa semakin besar. Selain itu, pemanfaatan aset dinilai dapat membantu menjaga keberlangsungan lapangan kerja bagi para pekerja terdampak. Dalam pandangannya, proses pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab tetap berjalan, namun aset yang memiliki nilai ekonomi perlu diselamatkan mengingat dana negara yang terlibat mencapai triliunan rupiah.

Anang juga memastikan proses hukum kasus Sritex terus berlanjut. Dalam perkara tersebut, jaksa berupaya memulihkan kerugian keuangan negara yang berasal dari penyaluran kredit sejumlah bank daerah, yakni Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB. Ia menyebutkan total aset yang telah disita mencapai nilai triliunan rupiah.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rencana pembentukan BUMN tekstil baru bertujuan menyelamatkan para pekerja Sritex yang kehilangan pekerjaan setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Pemerintah saat ini tengah mematangkan berbagai langkah strategis untuk merealisasikan pendirian perusahaan pelat merah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas industri tekstil nasional sekaligus melindungi tenaga kerja. Aset Sitaan Sritex Berpotensi Dimanfaatkan untuk BUMN Tekstil Baru

Kejaksaan Agung merespons rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru di sektor tekstil dengan memanfaatkan aset milik PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang telah disita dalam proses hukum. Korps Adhyaksa diketahui menyita sejumlah aset ekonomi perusahaan tersebut terkait dugaan korupsi penyaluran kredit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Anang Supriatna, menyatakan bahwa pemerintah dimungkinkan memanfaatkan aset berstatus barang sitaan tindak pidana, meski perkara hukum Sritex belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, terdapat mekanisme tertentu agar aset yang telah disita tidak mengalami penyusutan nilai atau kerusakan, selama pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan negara serta menjaga nilai ekonomisnya.

Ia menegaskan, apabila aset dibiarkan tanpa pengelolaan, potensi kerugian negara bisa semakin besar. Selain itu, pemanfaatan aset dinilai dapat membantu menjaga keberlangsungan lapangan kerja bagi para pekerja terdampak. Dalam pandangannya, proses pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab tetap berjalan, namun aset yang memiliki nilai ekonomi perlu diselamatkan mengingat dana negara yang terlibat mencapai triliunan rupiah.

Anang juga memastikan proses hukum kasus Sritex terus berlanjut. Dalam perkara tersebut, jaksa berupaya memulihkan kerugian keuangan negara yang berasal dari penyaluran kredit sejumlah bank daerah, yakni Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB. Ia menyebutkan total aset yang telah disita mencapai nilai triliunan rupiah.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rencana pembentukan BUMN tekstil baru bertujuan menyelamatkan para pekerja Sritex yang kehilangan pekerjaan setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Pemerintah saat ini tengah mematangkan berbagai langkah strategis untuk merealisasikan pendirian perusahaan pelat merah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas industri tekstil nasional sekaligus melindungi tenaga kerja.

Optimisme Pemerintah: Ekspor Tekstil Diproyeksi Melonjak 10 Kali Lipat dalam Satu Dekade



Pemerintah terus mendorong perluasan pasar ekspor ke berbagai negara sebagai strategi memperkuat kinerja perdagangan nasional. Salah satu sektor yang dinilai memiliki prospek besar adalah industri tekstil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa dengan terbukanya akses pasar ke banyak negara, ekspor tekstil Indonesia berpotensi meningkat hingga 10 kali lipat dalam 10 tahun ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam ajang Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026). Ia menegaskan bahwa peningkatan ekspor tekstil tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Lonjakan ekspor ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8 persen dalam dua tahun mendatang.

Airlangga menjelaskan bahwa fondasi pertumbuhan tersebut bertumpu pada investasi yang kuat, birokrasi yang semakin sederhana, serta kepastian penegakan hukum sebagaimana dicanangkan Presiden

Prabowo Subianto. Dengan kombinasi kebijakan yang terarah dan stabilitas regulasi, pemerintah optimistis Indonesia mampu “lepas landas” menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu mengakselerasi berbagai sumber pertumbuhan domestik, mulai dari belanja pemerintah hingga investasi sektor swasta. Selain itu, optimalisasi peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara juga menjadi kunci. Seluruh mesin produksi ekonomi, baik dari sisi fiskal maupun investasi, diharapkan bergerak harmonis dengan dukungan kebijakan yang terprediksi serta sistem keuangan yang semakin dalam dan kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia telah berada pada trajektori positif. Ia mengingatkan bahwa setelah sempat mengalami resesi saat pandemi COVID-19, Indonesia kembali memasuki fase ekspansi sejak 2023. Secara historis, siklus ekspansi ekonomi Indonesia rata-rata berlangsung tujuh tahun. Namun, dengan kebijakan yang optimal, fase ekspansi tersebut berpotensi diperpanjang hingga 10 tahun, bahkan sampai 2033.

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi yang kuat akan berdampak langsung pada meningkatnya kesempatan kerja. Ia pun mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak khawatir terhadap prospek lapangan kerja di masa depan. Dengan arah kebijakan yang tepat dan momentum ekspansi yang terjaga, peluang kerja diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya aktivitas ekonomi nasional.

Menjahit Ulang Daya Saing: Jalan Panjang Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia



Dalam satu dekade terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia berada dalam tekanan yang tidak ringan. Sektor yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung industri padat karya justru mengalami stagnasi ekspor sejak pertengahan 2010-an. Ketika negara pesaing melesat, Indonesia cenderung berjalan di tempat. Kondisi ini bukan semata-mata dipengaruhi perlambatan ekonomi global, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang belum ditangani secara konsisten.

Sejak sekitar 2015, ekspor tekstil Indonesia bergerak di kisaran belasan miliar dolar AS tanpa lonjakan berarti. Di saat yang sama, Vietnam dan Bangladesh mencatat pertumbuhan ekspor tekstil yang stabil dan agresif. Perbedaan kinerja ini menunjukkan bahwa daya saing Indonesia melemah secara relatif. Vietnam mengelola industrialisasi tekstilnya dengan terencana, mendorong modernisasi mesin, otomasi, dan integrasi kawasan industri sejak awal 2010-an. Walaupun upah meningkat, produktivitas turut naik sehingga biaya produksi per unit tetap kompetitif. Sementara itu, Bangladesh memilih strategi biaya tenaga kerja rendah secara konsisten untuk menarik pesanan global dalam skala besar.

Di Indonesia, kenaikan upah minimum sektor manufaktur dalam 10 tahun terakhir tidak

diiringi peningkatan produktivitas melalui pelatihan tenaga kerja, insentif teknologi, maupun restrukturisasi mesin yang memadai. Akibatnya, biaya tenaga kerja meningkat tanpa diimbangi efisiensi. Program restrukturisasi mesin yang pernah diluncurkan berjalan terbatas dan kurang konsisten, sehingga banyak pabrik masih menggunakan peralatan lama yang menekan kualitas dan produktivitas.

Ketergantungan pada impor bahan baku, terutama kapas dan serat sintetis, turut memperburuk situasi. Fluktuasi nilai tukar dan harga global langsung berdampak pada biaya produksi nasional. Hingga kini, penguatan industri hulu tekstil belum menjadi agenda strategis yang berkelanjutan. Di sisi lain, biaya energi dan logistik di dalam negeri masih relatif tinggi dibanding negara pesaing. Kebijakan pemerintah cenderung reaktif dan jangka pendek, bukan reformasi struktural yang menyeluruh.

Padahal, secara fundamental sektor TPT memiliki peran vital. Industri ini menyerap sekitar 3,7–3,9 juta tenaga kerja atau lebih dari 20% total tenaga kerja manufaktur. Kontribusinya terhadap ekspor non-migas berkisar 6–7%, serta menjadi bagian penting dalam kelompok Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang menyumbang hampir 4% terhadap PDB nasional. Pada 2025, sektor ini bahkan menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan di atas 4%, dan pada awal pemerintahan Prabowo Subianto sektor TPT tercatat tumbuh lebih dari 5%. Angka ini menandakan potensi besar apabila ditopang kebijakan yang tepat.

Karena itu, revitalisasi industri tekstil tidak cukup hanya dengan stimulus sesaat. Negara perlu hadir sebagai penguat ekosistem, bukan pesaing pelaku usaha. Peran BUMN, termasuk melalui entitas seperti Danantara, dapat diarahkan untuk memperkuat sektor

hulu—baik serat sintetis maupun kapas—serta membantu menekan biaya produksi melalui dukungan energi dan bahan baku yang lebih stabil dan transparan. Skema tersebut harus berbasis kemitraan sehat agar tidak menciptakan distorsi pasar.

Langkah strategis lainnya adalah pembentukan kementerian atau badan khusus tekstil guna memastikan sinkronisasi kebijakan upah, energi, perdagangan, dan investasi. Sejumlah negara seperti India, Pakistan, dan Turkmenistan telah memiliki struktur kelembagaan khusus yang menangani sektor tekstil sebagai agenda nasional. Indonesia dapat belajar dari pendekatan tersebut untuk memastikan fokus kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang.

Di sisi regulasi, RUU Pertekstilan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional perlu segera dibahas dan disahkan sebagai payung hukum komprehensif. Undang-undang ini penting untuk mendorong reindustrialisasi, melindungi industri lokal dari praktik impor tidak sehat, serta mengintegrasikan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Dengan kerangka hukum yang kuat, sektor TPT dapat diarahkan menjadi industri hijau, berdaya saing global, dan berorientasi ekspor.

Target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028–2029 menempatkan manufaktur sebagai penggerak utama. Agar kontribusinya signifikan terhadap PDB, industri TPT perlu tumbuh di atas 6%. Untuk itu, sektor ini dapat diposisikan sebagai prioritas dalam RPJMN 2025–2049 dan bahkan didorong menjadi Proyek Strategis Nasional. Tanpa langkah terintegrasi, risiko deindustrialisasi akan semakin nyata. Namun dengan sinergi negara dan pelaku usaha, industri tekstil Indonesia masih memiliki peluang besar untuk kembali menjadi kekuatan regional dan global.

Kolaborasi Strategis RI–AS Bernilai Rp 600 Triliunan, 11 MoU Diteken di Forum Bisnis Washington



Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memperkuat kemitraan ekonominya melalui penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan total nilai mencapai US\$ 38,4 miliar atau setara lebih dari Rp 600 triliun. Kesepakatan tersebut dicapai dalam sesi roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC) pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penandatanganan ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan ekonomi kedua negara tidak hanya bertumpu pada perdagangan, tetapi juga pada investasi strategis dan kolaborasi jangka panjang antara pemerintah dan pelaku usaha. Berbagai sektor tercakup dalam kerja sama tersebut, mulai dari pertambangan dan hilirisasi mineral kritis, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, manufaktur furnitur, hingga pengembangan teknologi semikonduktor.

Di sektor mineral kritis, disepakati Memorandum of Agreement antara Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dengan President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk serta President Director PT Freeport Indonesia

Tony Wenas. Kesepakatan ini memperkuat agenda hilirisasi sumber daya alam Indonesia sekaligus memastikan pasokan mineral strategis bagi rantai pasok global.

Pada sektor energi, Pertamina menandatangani MoU Oilfield Recovery dengan Halliburton. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan produktivitas lapangan migas nasional melalui penerapan teknologi dan metode enhanced oil recovery yang lebih modern.

Di bidang agrikultur, khususnya komoditas jagung, kerja sama dijalin antara PT Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan, dan Cargill Inc. Kolaborasi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi rantai pasok, serta penguatan ketahanan pangan.

Sektor tekstil dan garmen juga mendapat porsi signifikan. Busana Apparel Group dan Daehan Global masing-masing menandatangani MoU tentang kapas (cotton) dengan U.S. National Cotton Council. Kesepakatan ini diharapkan menjamin ketersediaan bahan baku kapas berkualitas bagi industri tekstil nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekspor produk garmen Indonesia ke pasar global.

Selain itu, kerja sama terkait pengelolaan shredded worn clothing atau pakaian bekas cacah dilakukan antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers, dan Ravel. Langkah ini dinilai penting dalam mendorong praktik ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah tekstil yang lebih berkelanjutan.

Di sektor furnitur dan produk kayu, ASMINDO menjalin kemitraan dengan Bingaman and Son Lumber, Inc, sementara HIMKI menandatangani MoU dengan American Hardwood Export Council. Kerja sama ini membuka peluang akses bahan baku kayu keras asal AS sekaligus memperluas pasar ekspor furnitur Indonesia yang selama

ini menjadi salah satu andalan devisa nonmigas.

Tak kalah strategis, pengembangan industri semikonduktor menjadi sorotan melalui sejumlah MoU antara Galang Bumi Industri (GBI) dengan Essence serta Tynergy Technology Group. Bahkan, GBI juga menjalin kesepakatan Transnational Free Trade Zone Friendship dengan Solanna Group LLC, yang bertujuan memperkuat jejaring kawasan perdagangan bebas lintas negara. Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia masuk lebih dalam ke rantai pasok industri teknologi global.

Secara keseluruhan, 11 nota kesepahaman tersebut mencerminkan perluasan spektrum kerja sama ekonomi Indonesia–AS yang semakin komprehensif. Bukan hanya soal nilai investasi yang besar, tetapi juga transfer teknologi, penguatan kapasitas industri, penciptaan lapangan kerja, dan integrasi ke rantai pasok global.

Momentum ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Dengan kombinasi sumber daya alam, pasar domestik yang besar, serta agenda hilirisasi dan industrialisasi yang agresif, Indonesia berupaya memanfaatkan kerja sama ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Utilisasi Tertekan, Impor Kapas dari AS Kian Sulit Terdongkrak



Rencana peningkatan pembelian kapas (cotton) dari Amerika Serikat (AS) dinilai sulit direalisasikan di tengah anjloknya utilisasi industri pemintalan dalam negeri. Rendahnya tingkat produksi membuat kebutuhan bahan baku belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, sehingga permintaan impor kapas pun masih tertahan.

Padahal, wacana peningkatan impor kapas dari AS menjadi bagian dari strategi negosiasi perdagangan, khususnya untuk mendorong penurunan tarif produk Indonesia menjadi 19 persen. Namun di lapangan, kondisi industri hulu tekstil belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma G. Wirawasta, menyampaikan bahwa tekanan terhadap industri serat dan benang masih sangat berat. Melemahnya permintaan pasar domestik, ditambah serbuan produk impor, membuat kapasitas produksi pabrik pemintalan tidak berjalan optimal.

“AS meminta kita membeli lebih banyak cotton dari mereka. Hal ini akan sulit dilaksanakan selama industri pemintalan kita utilitasnya masih di bawah 50 persen,” ujar Redma, Rabu (18/2/2026).

Sebelum pandemi, total impor kapas Indonesia tercatat sekitar 600.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 300.000 ton dipasok dari AS, menjadikan negara tersebut sebagai salah satu mitra utama penyedia bahan baku bagi industri tekstil nasional. Saat itu, utilisasi industri relatif stabil sehingga kebutuhan bahan baku pun tinggi.

Namun tren tersebut berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2022, volume impor kapas terus menurun. Hingga 2025, total impor kapas Indonesia hanya sekitar

300.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, porsi impor dari AS menyusut tajam menjadi sekitar 70.000 ton. Penurunan ini mencerminkan melemahnya aktivitas produksi di sektor pemintalan.

Menurut Redma, selama tingkat utilisasi belum membaik, hampir mustahil terjadi peningkatan impor kapas dari AS. Dengan kapasitas produksi yang masih berada di bawah 50 persen, pelaku industri cenderung menahan pembelian bahan baku karena persediaan masih mencukupi untuk memenuhi permintaan yang ada.

Ia menambahkan, rendahnya utilisasi bukan tanpa sebab. Industri pemintalan menghadapi tekanan berat akibat membanjirnya produk impor, baik berupa kain maupun benang jadi, yang masuk dengan harga sangat kompetitif. Bahkan, terdapat dugaan praktik dumping yang membuat produk impor dijual di bawah harga wajar.

Kondisi ini membuat pasar domestik, yang seharusnya menjadi penopang utama industri tekstil nasional, justru tergerus oleh produk luar negeri. Ketika permintaan dalam negeri melemah dan persaingan tidak berjalan adil, pabrik dalam negeri kesulitan meningkatkan produksi maupun menyerap tenaga kerja secara optimal.

Situasi tersebut juga berdampak pada daya tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan. Meski pemerintah berharap peningkatan pembelian kapas dari AS dapat menjadi bagian dari paket diplomasi ekonomi, realisasinya tetap bergantung pada kondisi riil industri di dalam negeri.

Redma menegaskan, perbaikan ekosistem industri menjadi kunci utama. Tanpa perlindungan pasar domestik yang lebih efektif dan pengawasan impor yang ketat,

sulit bagi industri pemintalan untuk bangkit dan meningkatkan utilisasi.

“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing, meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” ujarnya.

Dengan kata lain, upaya mendorong kenaikan impor kapas dari AS tidak bisa dilepaskan dari agenda pembenahan industri tekstil nasional secara menyeluruh. Selama utilisasi masih rendah dan pasar domestik belum pulih, ruang untuk meningkatkan pembelian bahan baku dari luar negeri akan tetap terbatas.

BELL dan ZATA Cetak Rekor Tertinggi Setahun, Euforia Saham Tekstil Menguat



PT Trisula Textile Industries Tbk dan PT Bersama Zatta Jaya Tbk menjadi sorotan pasar pada perdagangan 20 Februari 2026 setelah keduanya melesat tajam dan menembus level tertinggi dalam 52 pekan terakhir. Lonjakan harga yang terjadi dalam satu sesi tersebut memperlihatkan euforia kuat pada saham-saham sektor tekstil.

BELL ditutup di level 224 atau menguat 23,08 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di 182. Sepanjang perdagangan, saham ini bahkan sempat menyentuh level tertinggi intraday di 242. Sementara itu, ZATA melonjak lebih agresif dengan kenaikan

34,71 persen ke posisi 163 dari level 121, sekaligus mencetak rekor harga tertinggi dalam satu tahun terakhir.

Dari sisi valuasi pasar, kapitalisasi BELL tercatat sekitar Rp1,62 triliun dengan rasio price to earnings (PER) 319,38. Adapun ZATA memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp1,38 triliun dengan PER yang lebih tinggi, yakni 772,15. Kenaikan signifikan dalam satu hari perdagangan tersebut juga diiringi rentang pergerakan harga yang lebar, mencerminkan tingginya minat sekaligus volatilitas.

Secara teknikal, BELL menunjukkan dominasi sinyal beli yang sangat kuat. Indikator Relative Strength Index (RSI) berada di level 75,257, sementara Stochastic RSI di 83,367, keduanya sudah masuk kategori overbought atau beli berlebihan. Indikator CCI tercatat di 198,9481 dan Williams %R di minus 26,866, yang sama-sama memperlihatkan tekanan beli masih mendominasi. MACD berada di zona positif 14,696 dengan sinyal beli, sedangkan Rate of Change (ROC) di 17,277 mengindikasikan percepatan kenaikan harga. ADX di level 35,72 menunjukkan tren yang sedang berlangsung dengan kekuatan cukup solid, dan ATR di angka 11 menandakan volatilitas yang meningkat.

Struktur pergerakan harga BELL juga memperlihatkan posisi yang kokoh di atas seluruh rata-rata pergerakan utama. MA5 berada di 208,8, MA10 di 195,9, MA20 di 193,2, serta MA50, MA100, dan MA200 yang seluruhnya masih berada di bawah harga saat ini. Berdasarkan pivot point klasik, level 229 menjadi pivot utama dengan resistance di 240 dan 253 serta support di 216 dan 205. Dengan penutupan di 224, harga berada di antara support 216 dan pivot 229 setelah sempat menguji resistance 240.

Kondisi serupa juga tercermin pada ZATA yang menampilkan sinyal teknikal sangat beli. RSI berada di 77,002, CCI di 212,6101,

dan Williams %R di minus 10,056, seluruhnya menunjukkan area overbought. ADX yang mencapai 71,068 mencerminkan kekuatan tren yang sangat tinggi. MACD berada di 30,874 dengan sinyal beli, sedangkan ROC di 239,394 menandakan percepatan kenaikan harga yang tajam. Bull/Bear Power di 157,054 memperlihatkan dominasi tekanan beli, dan ATR di 31,0714 mengindikasikan volatilitas yang cukup tinggi.

Harga ZATA pun berada di atas seluruh rata-rata pergerakan utama, dengan MA10 di 120,700 dan MA20 di 94,200. MA50 dan MA100 berada di kisaran 70 hingga 84, sementara MA200 di 109,780. Penutupan di level 163 sekaligus menjadi pivot klasik, dengan resistance berikutnya berada di 208 dan 236 serta support terdekat di 135 dan 90.

Secara keseluruhan, pergerakan BELL dan ZATA menunjukkan karakter teknikal yang serupa pada akhir pekan tersebut. Keduanya berada di atas seluruh moving average utama, mencetak rekor harga 52 pekan, serta didukung indikator momentum yang berada di area beli berlebih dengan volatilitas yang meningkat. Kondisi ini mencerminkan tren naik yang kuat, meski pada saat yang sama mengindikasikan potensi konsolidasi jangka pendek mengingat posisi indikator yang sudah berada di area overbought.



**YAYASAN
KONSUMEN TEKSTIL
INDONESIA**

INDONESIAN TEXTILE CONSUMERS FOUNDATION

Kuota Ekspor 0% ke AS Dinilai Berat, Industri Tekstil Terkendala Utilisasi dan Syarat Impor Kapas



Kesepakatan penghapusan tarif ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia ke Amerika Serikat (AS) menjadi 0% melalui skema Tariff Rate Quota (TRQ) ternyata belum sepenuhnya disambut antusias oleh pelaku industri. Di balik peluang akses pasar yang lebih terbuka, industri hulu dalam negeri justru menghadapi tantangan berat untuk memenuhi syarat volume impor bahan baku dari AS sebagai kompensasi kuota ekspor.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, menyebut kondisi utilisasi industri pemintalan saat ini masih berada di bawah 50%. Situasi tersebut membuat industri kesulitan meningkatkan impor kapas dari AS sesuai ketentuan dalam nota kesepahaman (MoU) yang diteken di Washington DC.

Dalam kesepakatan terbaru, besaran kuota ekspor tekstil Indonesia ke AS sangat bergantung pada volume impor bahan baku asal Negeri Paman Sam, seperti kapas dan serat buatan. Artinya, semakin besar impor bahan baku dari AS, semakin besar pula kuota ekspor yang bisa dinikmati dengan tarif 0%. Namun, lemahnya daya serap industri menjadi hambatan utama.

Secara normal, industri pemintalan nasional mampu menyerap hingga 300.000 ton kapas. Akan tetapi, dalam kondisi saat ini, realisasi impor kapas dari AS diperkirakan hanya sekitar 75.000 ton. Sementara itu, pihak AS mensyaratkan Indonesia mengimpor sedikitnya 150.000 ton kapas untuk memperoleh kuota ekspor yang lebih besar. Kesenjangan inilah yang membuat pelaku industri merasa terbebani.

Menurut APSyFI, persoalan mendasar yang menekan utilisasi industri hulu adalah membanjirnya produk tekstil impor ilegal dan praktik dumping, terutama dari China. Produk-produk tersebut masuk ke pasar domestik dengan harga sangat rendah sehingga menggerus pangsa pasar produsen lokal. Akibatnya, banyak pabrik memilih menurunkan kapasitas produksi demi efisiensi di tengah persaingan yang dinilai tidak sehat.

Dalam kondisi pasar domestik yang tertekan, mendorong industri untuk meningkatkan impor kapas dari AS bukan perkara mudah. Redma menegaskan bahwa sebelum menargetkan kenaikan volume impor, pemerintah perlu terlebih dahulu membenahi iklim industri, termasuk pengawasan terhadap barang ilegal dan praktik dumping yang merugikan pelaku usaha nasional.

Kesepakatan tarif 0% ini sendiri merupakan bagian dari kerja sama ekonomi bertajuk "Agreement Toward a New Golden Age Indo-US Alliance" yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Perjanjian tersebut mencakup pembebasan tarif pada 1.819 pos tarif produk unggulan Indonesia, mulai dari tekstil, minyak sawit, hingga komponen elektronik dan semikonduktor.

Sebelumnya, industri TPT Indonesia sempat terpukul oleh tarif berlapis yang mencapai 29% di pasar AS. Kondisi itu turut berkontribusi pada penurunan nilai ekspor nasional dari US\$4,8 miliar menjadi US\$4,5 miliar. Para importir di AS pun sempat mengeluhkan tingginya biaya akibat beban tarif tambahan tersebut.

Meski demikian, pelaku industri menilai insentif tarif 0% melalui mekanisme TRQ belum otomatis menjadi solusi instan. Tanpa perbaikan fundamental di sektor hulu—terutama peningkatan utilisasi pabrik pemintalan—Indonesia berisiko tidak mampu memaksimalkan peluang kuota ekspor yang tersedia. Industri berharap kebijakan perdagangan internasional dapat diimbangi dengan penguatan pasar domestik agar manfaat kesepakatan ini benar-benar terasa bagi seluruh rantai pasok tekstil nasional.

Akses Nol Tarif ke AS Dibuka, Industri Tekstil RI Siap Bangkit

Kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat memasuki fase baru setelah kedua negara resmi menyepakati penghapusan tarif bea masuk menjadi 0 persen untuk produk tekstil dan garmen (apparel) asal Indonesia dengan skema kuota tertentu. Kesepakatan ini menjadi angin segar bagi industri padat karya nasional yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan global.

Berdasarkan laporan Antara, Selasa (24/2/2026), skema yang digunakan adalah Tariff Rate Quota (TRQ). Melalui mekanisme ini, produk tekstil dan garmen Indonesia dapat masuk ke pasar Amerika Serikat dengan tarif 0 persen sepanjang masih berada dalam batas kuota yang telah ditentukan.

Kuota tersebut tidak diberikan secara bebas, melainkan dikaitkan dengan volume bahan baku tekstil yang diimpor Indonesia dari Amerika Serikat, seperti kapas (cotton) dan serat buatan (man-made fiber). Dengan kata lain, semakin besar impor bahan baku dari AS, semakin besar pula peluang produk tekstil Indonesia memperoleh fasilitas tarif nol persen.

Seluruh ketentuan kerja sama ini telah dituangkan dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang resmi ditandatangani oleh kedua negara. Perjanjian tersebut menjadi landasan hukum baru dalam hubungan dagang bilateral Indonesia-AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kesepakatan ini berpotensi membawa dampak signifikan bagi sektor tekstil dan garmen nasional. Menurutnya, industri ini menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja secara langsung.

“Ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta.

Industri tekstil dan garmen memang dikenal sebagai sektor padat karya yang menopang ekonomi berbagai daerah. Dengan adanya fasilitas tarif 0 persen, daya saing produk Indonesia di pasar AS diproyeksikan meningkat, terutama di tengah persaingan ketat dengan negara produsen tekstil lainnya.

Secara umum, Amerika Serikat tetap memberlakukan tarif resiprokal sebesar 19 persen terhadap produk impor dari Indonesia. Namun, terdapat pengecualian bagi produk-produk yang masuk dalam

daftar yang telah diidentifikasi dalam perjanjian ART.

Selain tekstil dan garmen, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia kini mendapatkan fasilitas pembebasan tarif hingga 0 persen. Daftar tersebut mencakup berbagai komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Kebijakan ini dinilai memperluas akses pasar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sekaligus memperkuat fondasi hubungan dagang bilateral kedua negara. Di tengah dinamika perdagangan global yang penuh ketidakpastian, pembukaan akses tarif nol persen menjadi peluang strategis untuk meningkatkan nilai ekspor nasional.

Dari sisi prosedural, Airlangga menjelaskan bahwa perjanjian ART akan mulai berlaku efektif 90 hari setelah seluruh proses hukum di masing-masing negara diselesaikan. Di Indonesia, tahapan tersebut mencakup konsultasi dengan DPR RI, sementara di Amerika Serikat proses penyelesaian dilakukan melalui mekanisme parlemen setempat.

Menariknya, perjanjian ini juga bersifat dinamis. Kedua negara membuka peluang untuk melakukan perubahan kesepakatan di masa mendatang berdasarkan persetujuan tertulis bersama. Bahkan, terdapat kemungkinan penyesuaian tarif menjadi lebih rendah melalui forum Council of Board yang akan dibentuk sebagai bagian dari implementasi perjanjian.

Dengan kombinasi akses pasar yang lebih luas dan potensi peningkatan daya saing, industri tekstil nasional kini berada di persimpangan penting. Jika mampu memaksimalkan peluang ini, bukan hanya

kinerja ekspor yang terdongkrak, tetapi juga keberlanjutan jutaan lapangan kerja yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Indonesia.



KAHMI Tekstil Tuntut Transparansi MOU Worn Clothing Dalam ART Dengan AS

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menuntut transparansi MOU antara Pan Brothers dan Raven dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART). Tuntutan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto untuk memastikan bahwa barang yang akan diimpor adalah cacahan bukan pakaian jadi bekas. Agus menyatakan bahwa sudah jelas jika worn clothing dalam deskripsi di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia ada di HS 6309, sedangkan dalam bentuk cacahan dideskripsikan sebagai rags masuk kedalam HS 6310.

“Jadi untuk kejelasan barang apa yang akan diimpor, kita perlu transparansi MOU yang ditandatangani oleh Pan Brothers dan Raven, jangan sampai demi mendapat tarif ekspor 0% untuk perusahaan yang bersangkutan,

pasar domestik kita dipenuhi oleh pakaian bekas, kasihan industri kecil” jelas Agus.

Kemudian Agus menjelaskan bahwa dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, terjadi juga kesepakatan antara AS dengan Bangladesh, namun mereka hanya memasukan importasi kapas saja tanpa worn clothing. “Bahkan pasca kesepakatan, Industri tekstil di Bangladesh langsung melakukan pembelian kapas dari AS dan mengurangi pembelian kapas dari India” ujar Agus. “Hal ini memperlihatkan bahwa Bangladesh sangat paham penting penguatan integrasi industri” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa kesepakatan ini sangat baik untuk meningkatkan utilisasi industri TPT nasional yang saat ini berada dibawah 50%.

Meski masih dalam posisi pesimis, Redma mengatakan bahwa untuk meningkatkan importasi kapas dari AS pemerintah perlu mengendalikan importasi benang dan kain secara serius agar permintaan kain dan benang naik karena selama ini sektor tekstil hulu dan antara tertekan barang impor murah dumping hingga importasi ilegal. Terkait worn clothing, Redma meminta pengawasan yang ketat agar yang masuk adalah betul-betul dalam bentuk cacahan.

Menanggapi hal ini, Agus justru menyatakan bahwa importasi worn clothing adalah cara singkat sektor garment yang digawangi Pan Brothers untuk menutup kegagalan pemerintah dalam memperkuat integrasi ekosistem industri TPT nasional. “Harusnya kan yang kita impor bahan baku yang memang kita tidak bisa sediakan didalam negeri seperti kapas, maka secara otomatis utilisasi industri pemintalan, pertenunan, perajutan, pewarnaan hingga industri garment naik utilitasnya sebagai satu

kesatuan ekosistem” ungkap Agus. “Tapi kan sektor hilir kita tidak peduli akan hal ini, maka agar tetap dapat tarif 0% dari AS mereka kasih alternatif impor worn clothing” tegasnya.

Komentar Agus ini merujuk pada sikap sektor hilir yang selalu meminta kemudahan impor benang dan kain dengan berbagai fasilitas. “Bahkan mereka selalu menolak pengenaan anti dumping dan safeguard yang selama ini menghancurkan industri hulu dan antara” jelas Agus. “Bahkan ketika AS meminta kita impor kapas lebih banyak, mereka tidak mau karena masih memerlukan kain murah dari China, akhirnya mereka ambil jalan pintas impor worn clothing” tambahnya.

Namun masalah tidak selesai disitu, Agus kemudian mempertanyakan perusahaan di dalam negeri yang mampu memproses limbah hasil cacahan pakaian bekas senilai USD 200 juta. Terlebih teknologi recycle yang ada di Indonesia saat ini hanya physical recycle itu pun berasal dari kain sisa produksi garment (pre-used) bukan kain cacahan dari pakaian bekas (posh-used). “Dan kapasitasnya sangat kecil, tidak akan mampu mengolah sampai USD 200 juta limbah” kata Agus.

Setelah dilakukan transparansi, KAHMI Tekstil meminta semua pihak duduk bersama demi kelangsungan ekosistem pertekstilan nasional. “Jangan mentang-mentang merasa lebih dekat dengan pejabat dipemerintahan ada pihak yang semena-mena memaksakan kehendaknya, menerobos aturan yang ada dan merugikan ekosistem secara keseluruhan, harus duduk bersama dan setara” ungkap Agus. “Dan untuk pemerintah, kami harap bisa mendengar suara dibawah dengan lebih jernih, jangan asal membuat Presiden senang dengan iming-iming yang justru merugikan dikemudian hari” pungkasnya.

